

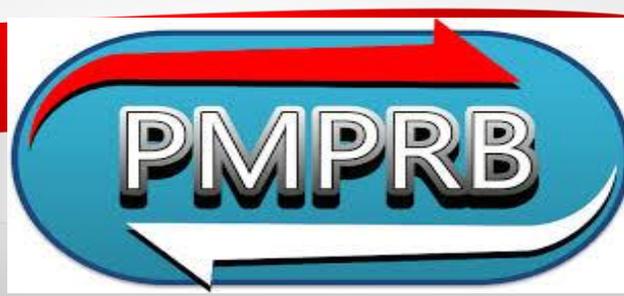


Hasil **PMPRB** dan Rencana Aksi 2016

Jakarta, 11 Mei 2016

Setyanta Nugraha
Inspektur Utama Sekretariat Jenderal DPR RI

Sosialisasi Road Map dan PMPRB Pejabat Eselon II dan III Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI



Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan RB yang dilakukan secara mandiri (*self assesement*) yang mencakup penilaian terhadap dua komponen, yaitu **Pengungkit** (Enablers) dan **Hasil** (Results)

Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi

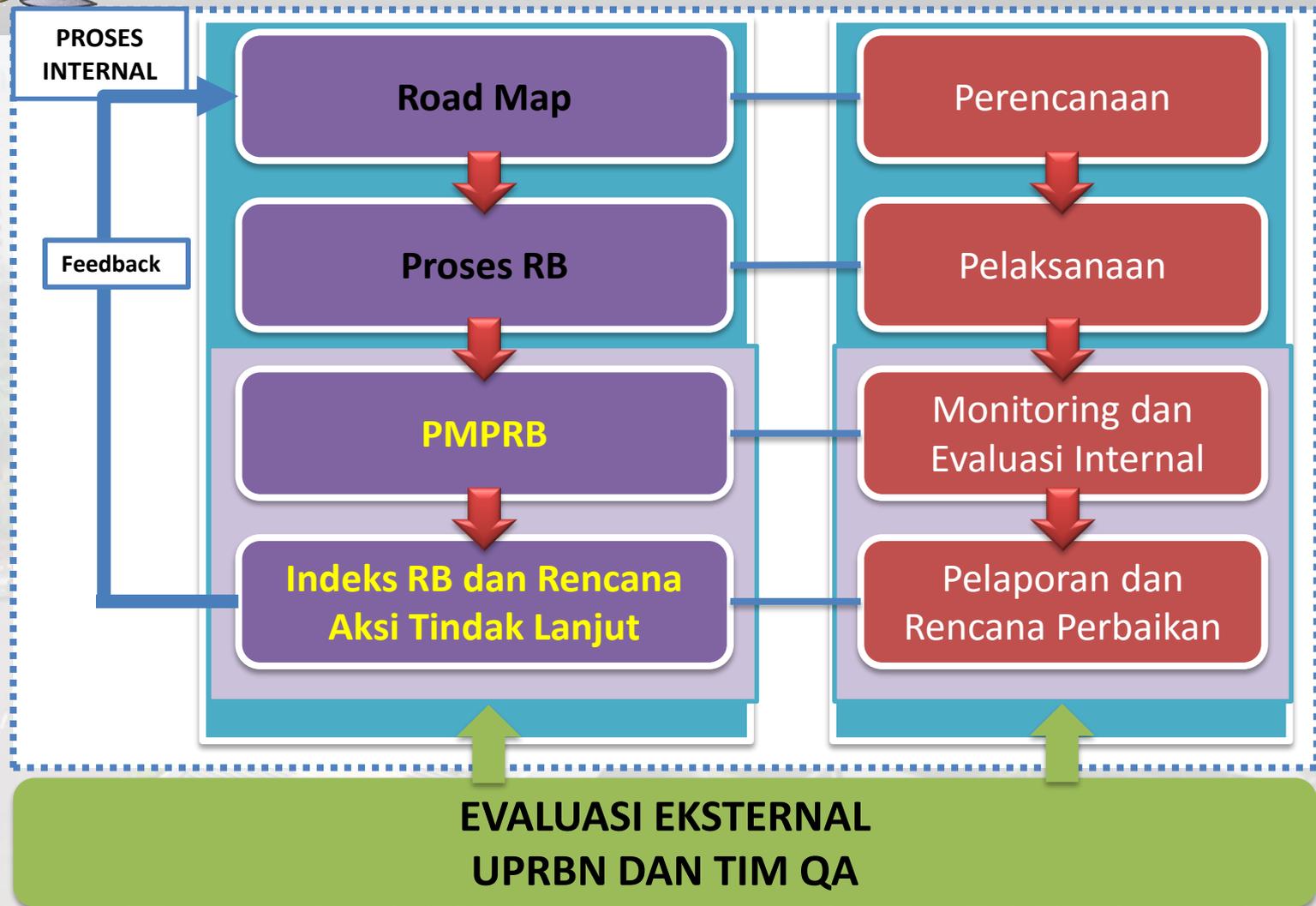
Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan

Secara umum proses PMPRB paling lama 3 bulan, mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaporan (reporting) secara *on line*. Tanggal penting setiap tahun anggaran :

1. 2 Januari s/d 31 Maret. Persiapan dan Pelaksanaan PMPRB di Instansi.
2. 31 Maret Penyerahan Laporan PMPRB kepada PMPRB Resources Center KemenPAN RB secara *on line*.
3. 31 Mei PMPRB National Forum/Conference (Public Expose Profil Nasional PMPRB)



PROSES BISNIS EVALUASI



PRINSIP PENILAIAN RB



Perbaikan berkelanjutan

Hasil penilaian digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi secara terus menerus, melalui siklus rencanakan, laksanakan, monitoring dan evaluasi serta lakukan perbaikan



Kejujuran dalam penilaian

Memotret/menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara akurat sesuai dengan kondisi senyatanya dalam praktik. Rekayasa/ketidakjujuran justru tidak akan dapat memberikan informasi mengenai perbaikan-perbaikan berkelanjutan yang harus dilakukan.



Terdokumentasikan

Seluruh proses pelaksanaan reformasi birokrasi harus didokumentasikan dengan baik sesuai dengan siklus rencanakan, laksanakan, monitoring dan evaluasi serta lakukan perbaikan

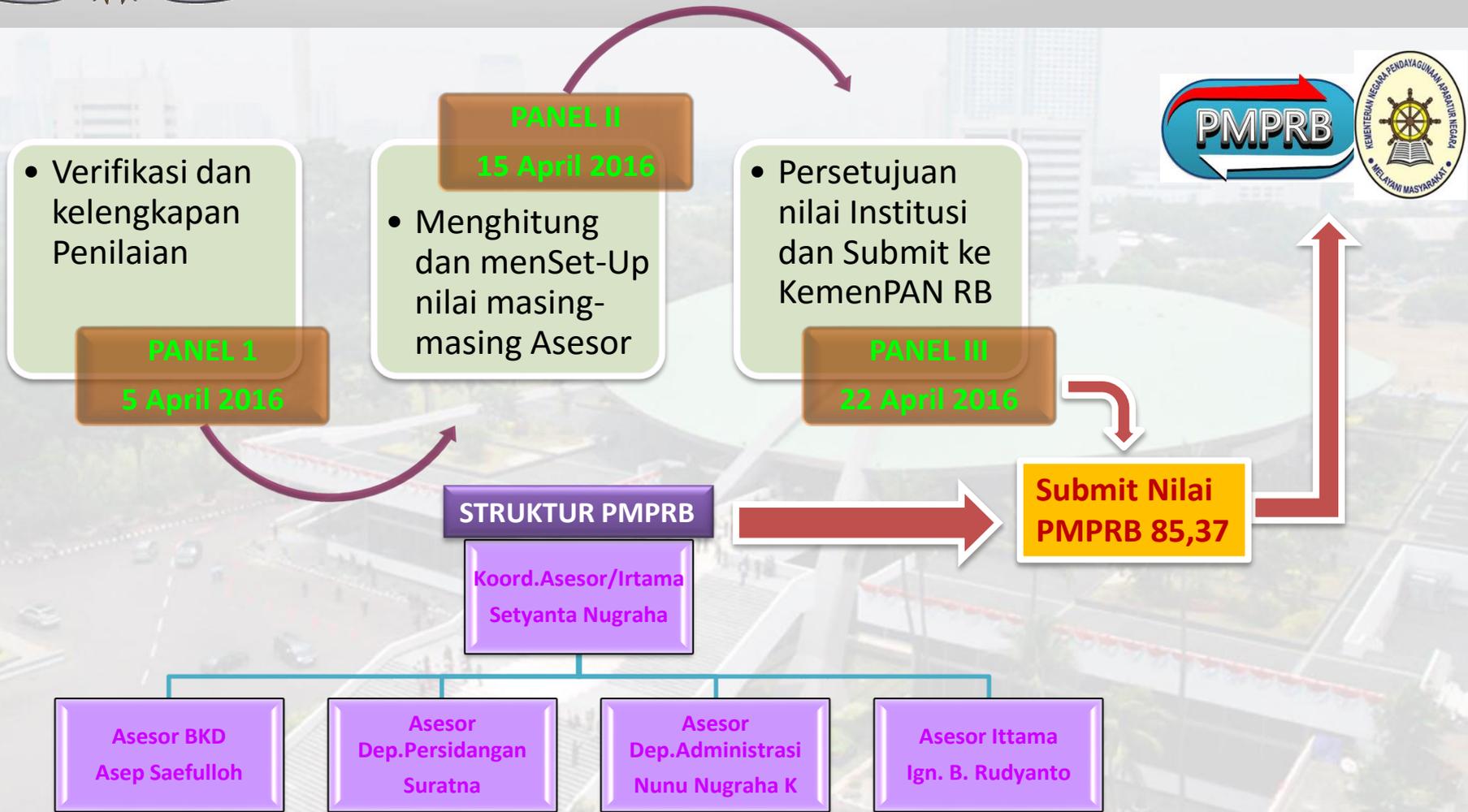


KATEGORI PENILAIAN

No	Predikat	Nilai Absolut	Interpretasi
1.	AA	> 90 – 100	Istimewa
2.	A	> 80 – 90	Memuaskan
3.	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4.	B	> 60 – 70	Baik , perlu sedikit perbaikan
5.	CC	> 50 – 60	Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6.	C	> 30 - 50	Kurang , perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
7.	D	0 - 30	Sangat Kurang , perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.



KEGIATAN PENILAIAN MANDIRI 2016





KERANGKA LOGIS PENILAIAN



EVALUASI RB (PERMENPAN 14/2014)





NILAI PENGUNGKIT

No	Komponen Penilaian	Nilai Maks	Nilai 2014	Nilai 2015	Nilai 2016	% Capaian
A	Pengungkit					
1	Manajemen Perubahan	5,00	3,08	3,92	5,00	100
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	1,88	2,29	5,00	100
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,82	3,84	6,00	100
4	Penataan Tata Laksana	5,00	3,34	3,60	4,51	90,10
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	5,07	11,65	14,81	98,71
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,65	3,33	5,74	95,6
7	Penguatan Pengawasan	12,00	5,12	6,18	8,47	70,57
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	2,96	2,96	5,39	89,75
		60,00	26,92	37,77	54,99	91,50



NILAI HASIL

No	Komponen Penilaian	Nilai Maks	Nilai 2014	Nilai 2015	Nilai 2016	% Capaian
B	Hasil					
1	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	20,00	8,56	12,40	12,57	64,85
2	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	3,00	8,07	10,00	100
3	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	0,00	7,75	7,50	75,00
	Sub Total Komponen Hasil	40,00	11,56	28,22	30,47	76,18
	Indeks Reformasi Birokrasi	100,00	38,48	65,99	85,37 ?	

70,67

71,94

85,37

Hasil PMPRB Instansi



HASIL SURVEY INTERNAL

IKP

Indeks Kualitas Pelayan

Hasil survey layanan persidangan, layanan kesehatan, dan layanan perpustakaan yang dilakukan melalui purposive random sampling menunjukkan **IKP sebesar 2,92** dari skala 4,00 -> **Belum Menggembirakan.**

Unsur pelayanan biaya atau tariff perlu diperbaiki, karena dibawah rata-rata, sedangkan untuk indeks yang lain perlu dipertahankan dan tetap dilakukan peningkatan agar tidak tertinggal dari K/L lain.

Maklumat Pelayanan agar diperhatikan

IPAK

Indeks Persepsi Anti Korupsi

IPAK Setjen DPR RI **2,85** dari skala 4,00 atau masih berada dibawah rata-rata 28 K/L, yaitu 3,00

SURVEY EKSTERNAL 2016 ?



STAKEHOLDER



Anggota DPR RI



Mitra Kerja



Masyarakat



RENCANA AKSI 2016

Area Perubahan 1: Mental Aparatur

Koordinator Area: Dr. Asep A. Saefulloh

Rencana Aksi

1. Penetapan Religius, Akuntabel, Profesional dan Integritas (RAPI) sebagai budaya unggul
2. Pencanangan Budaya Kerja Positif
3. Penegakkan kode etik dan kode perilaku
4. Evaluasi Tim Agen Perubahan

Area Perubahan 2: Penguatan Sistem Pengawasan

Koordinator Area: Dr. Dewi Barliana S., M.Psi.

Rencana Aksi

1. Meningkatkan Public Campaign terkait penanganan gratifikasi dan melakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi secara berkala Evaluasi sistem pengendalian penyusunan peraturan-peraturan Sekjen DPR RI
2. Mengembangkan lingkungan pengendalian dan penilaian risiko atas seluruh organisasi
3. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan WBS Setjen DPR RI
4. Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
5. Melakukan evaluasi secara berkala atas zona integritas yang telah ditetapkan dan menetapkan unit kerja sebagai "menuju WBK/WBBM"
6. Meningkatkan penerapan pengawasan yang berfokus pada client dan berbasis resiko



RENCANA AKSI 2016

Area Perubahan 3: Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Koordinator Area: Ign. Bambang Rudyanto, S.H., M.H.

Rencana
Aksi

Menyusunan manajemen kinerja organisasi

Area Perubahan 4: Penguatan Kelembagaan

Koordinator Area: Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M.

Rencana
Aksi

Monitoring dan evaluasi persekjen No.6 tahun 2015
dan Persekjen No.2 tahun 2016



RENCANA AKSI 2016

Area Perubahan 5: Penguatan Tata Laksana

Koordinator Area: Witingsih Yuhelmi, S.E., M.M.

Rencana Aksi

1. Melengkapi peta proses bisnis (SOP) di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
2. Meningkatkan pengembangan e-government melalui pengembangan aplikasi

Area Perubahan 6: Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN

Koordinator Area: Nunu Nugraha Khuswara, S.H., M.H.

Rencana Aksi

1. Melakukan kembali perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
2. Memaksimalkan pegawai melalui alih jabatan dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI
3. Meningkatkan pengembangan pegawai berbasis kompetensi
4. Membangun pola talent pool (pola karir pegawai)
5. Melakukan evaluasi jabatan sesuai kebutuhan
6. Pengembangan pemanfaatan sistem informasi pegawai



RENCANA AKSI 2016

Area Perubahan 7: Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Koordinator Area: Juliasih, S.H., M.H.

Rencana Aksi

1. Merencanakan / Penyusunan pedoman evaluasi peraturan-peraturan Sekjen DPR RI : SK Sekretaris Jenderal DPR RI No: 300/SEKJEN/2016 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Pedoman Evaluasi Produk Hukum Setjen DPR RI
2. Evaluasi sistem pengendalian penyusunan peraturan-peraturan Sekjen DPR RI

Area Perubahan 8: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan *Quick Wins*

Koordinator Area: M. Dimiyati Sudja', S.Sos., M.Si.

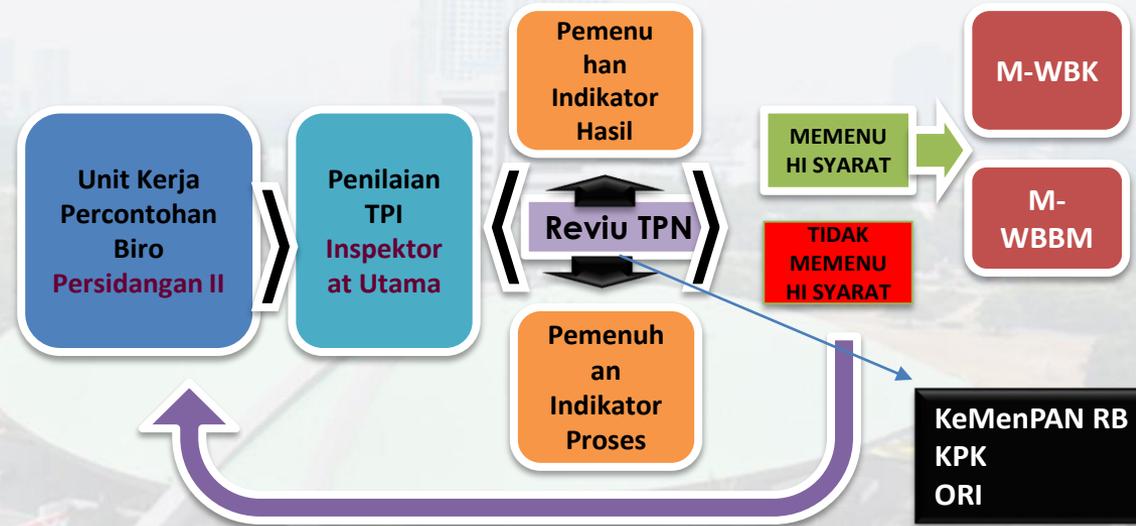
Rencana Aksi

1. Melakukan reviu dan penambahan penyusunan standar pelayanan di Sekretariat Jenderal DPR RI
2. Mengimplementasi aplikasi penanganan pengaduan (WBS)
3. Melakukan survei kepuasan terhadap pelayanan
4. Meningkatkan dan mengembangkan pemanfaatan IT untuk pelayanan
5. membangun aplikasi pooling melalui web: dpr.go.id
6. Penyempurnaan web pelayanan publik (survey)



BIRO PERSIDANGAN II SEBAGAI WBK / WBBM

SYARAT	WBK	WBBM
TINGKAT INSTANSI PEMERINTAH Sekretariat Jenderal	Opini BPK "WTP"	Opini BPK "WTP" selama minimal 2 tahun berturut-turut
	Nilai AKIP minimal "CC"	
TINGKAT UNIT KERJA Biro Persidangan II	Setingkat Es. I s.d Es. III	
	Peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis	
	Melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik	
	Mengelola sumber daya yang cukup besar	
		Telah sebelumnya mendapat predikat WBK



SYARAT	WBK	WBBM
Nilai Total (Pengungkit dan Hasil) minimal	75	85
Nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal	18	18
Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	13,5	13,5
Nilai sub-komponen "Persentasi TLHP" minimal	3,5	3,5
Nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal	-	16



#Ayo berubah!

TERIMA KASIH
Ittama.dpr.go.id

